

## **SKRIPSI**

# **PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)**



**OLEH:**

**RIO ATMA PUTRA**

**B 111 12 197**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2016**

# HALAMAN JUDUL

## PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

(Studi Kasus Balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka makassar)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Studi

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

RIO ATMA PUTRA

B 111 12 197

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh

**RIO ATMA PUTRA  
B 111 12 197**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 10 November 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua**



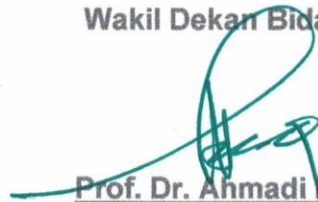
**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Sekretaris**



**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680125 199702 2 001

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

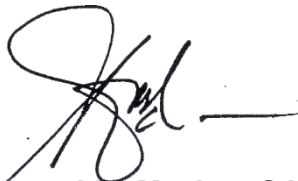
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : RIO ATMA PUTRA  
Nomor Pokok : B 111 12 197  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI REHABILITASI  
TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.  
(Studi Kasus Balai Rehabilitasi Narkotika  
Baddoka makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Oktober 2016

Pembimbing I



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**

NIP.196231024 198903 1 002

Pembimbing II



**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**

NIP. 19680125 199702 2 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : RIO ATMA PUTRA  
Nomor Pokok : B 111 12 197  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI REHABILITASI  
TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.  
(Studi Kasus Balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka  
makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Nopember 2016

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 1961 0607 198601 1003

## ABSTRAK

RIO ATMA PUTRA (B111 12 197), judul skripsi “Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka Makassar” di bawah bimbingan Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H., sebagai pembimbing I dan Dr. Wiwie Heryani S.H.,M.H., sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan rehabilitasi yang dilakukan balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka makassar terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan Narkotika. serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan dengan bersifat analisis deskriptif dan wawancara lapangan terhadap pihak-pihak bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di pusat rehabilitasi Narkotika Baddoka kota Makassar sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melihat dimana pusat rehabilitasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dalam rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi sosial dan medis, tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi yang disertai dengan terapi-terapi untuk memulihkan para pecandu narkotika. **Kedua**, Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu atau pengguna narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkotika, bahwa dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN, takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkotika, dan masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis). Anggaran cenderung juga menjadi kendala balai rehabilitasi BNN Baddoka makassar, dimana anggaran yang diberikan tidak mampu membiayai banyaknya sumber daya manusia yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “**Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika**”(Studi Kasus Balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka Makassar).

Shalawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengarungi hidup yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu akan arti kehidupan dan cinta yang hakiki.

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua **Ayahanda Ambo Taweng** dan **Ibunda Hasnah** atas segala kasih sayang, cinta dan dukungannya yang tiada henti sehingga membentuk kepribadian dan kedewasaan penulis dalam meraih cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang

yang telah kalian berikan selama ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi. S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr., Hamzah Halim, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III.
4. Prof. Dr., Muhammad Yunus, SH.,M.Si selaku penasihat akademik penulis
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.,. selaku Pembimbing I serta Ibu Dr. Wiwie Heryani., S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan keteguhannya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya dosen pada bagian Hukum Pidana.
7. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



8. Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya tanpa terkecuali yang telah membantu penulis selama penelitian
9. Kepala balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka Makassar beserta jajarannya terkhusus bro Irpan B Tangahu. S.Psi. selaku Program Manager dan bro Fitri Adriani. S.Psi. selaku Consolor yang memberikan data dan menyisihkan waktunya untuk menyelesaikan penelitian yang penulis lakukan.
10. Organisasi Germatik (Gerakan Mahasiswa Anti Narkotika) dan LPMH-UH (Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin) Terima kasih atas segalanya.
11. Sahabat-sahabat Penulis Terima kasih atas semua waktu dalam kebersamaan dalam suka dan duka, tidak ada kalian tidak ramai.
12. Teman-teman Angkatan 2012 dalam melalui bahtera perkuliahan dari maba (mahasiswa baru hingga menempuh gelar sarjana hukum).
13. Senior-Senior Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Terima Kasih Atas Bimbingannya.
14. Teman-teman KKN 90 Posko Kec Herlang Kelurahan Bontokamase, Kabupaten Bulukumba Beserta Perangkat Daerah, Terkhusus Ibu Lurah Bontokamase Dan Keluarga.

Semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral

maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya semoga keikhlasan yang telah dipersembahkan kepada penulis mendapat rahmat dan hidayah dari yang maha mengetahui. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Karenanya, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tak ada manusia yang sempurna apabila ada kesalahan dalam penulisan ini mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar. september 2016

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan .....	9
D. Manfaat Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur – unsur Tindak Pidana .....	17
B. Jenis Jenis Sangksi Pidana.....	19
1.Sangksi pidana pokok .....	19
2. Sangksi pidana tambahan.....	24
C. Tempat dan waktu tindak pidana.....	27
D. Teori pembedaan .....	28
E. Narkotika .....	36
1. Pengertian narkotika .....	36
2. Golongan narkotika.....	36
3. Jenis pengolahan narkotika .....	37
F.Efektifitas Hukum .....	39
G.Hambatan dalam realisasi penegakan hukum .....	44

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Lokasi Penelitian .....	56
B. Jenis dan Sumber Data.....	57
C. Teknik Pengumpulan Data .....	58
D. Analisis Data .....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Proses Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	59
B. Hambatan dalam penerapan rehabilitasi yang dilakukan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagai mana yang di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, kejahatan di bidang narkoba, korupsi dan gangguan keamanan negara (terorisme/pemberontakan).

Indonesia yang merupakan negara yang pada zaman penjajahan merupakan negara jajahan belanda masih meninggalkan pengaruh hukum di indonesia salah satunya sistem hukum indonesia itu sendiri yang masih menganut hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum Civil Law. Salah satu pengaruh besar yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUUHPer). Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi “segala peraturan

perundang undangan yang masih ada dianggap masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari hukum publik dimana hukum pidana ini berperan penting dalam tata hukum dan bernegara. Dalam aturan hukum pidana yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, namun seiring perkembangan Zaman kejahatan semakin berkembang sehingga ada beberapa delik khusus yang diatur diluar KUHP seperti narkoba. Narkoba merupakan salah satu musuh bagi negara yang tentunya harus diberantas. Walaupun tidak seterkenal kasus-kasus korupsi namun permasalahan narkoba ini sangatlah penting untuk kita hilangkan dari negara kita.

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Di era modern ini, Indonesia tidak lagi menjadi negara transit. Indonesia bukan lagi sebagai wilayah transit akan tetapi juga sebagai wilayah pasaran narkoba yang potensial bahkan kini Indonesia sudah dianggap sebagai produsen ekstasi, yang dibuktikan dengan pernahnya aparat hukum mengerebek sebuah pabrik ekstasi di kampung Tegal Sari, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Banten, di Tahun 2005. Tempat tersebut yang merupakan bekas pabrik kabel PT Sumaco Jaya Abadi sehingga membuat masyarakat tidak curiga akan tempat itu. Pengerebekan ini merupakan terbesar ketiga setelah yang terjadi di Fiji dan Cina.<sup>2</sup>

Reformasi hukum pidana dalam undang-undang narkoba. Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Antisipatif terhadap ancaman tindak kriminalitas yang juga dalam bentuk “penyalahgunaan” narkoba dan psikotropika dilakukan melalui pembaharuan hukum yang cukup memiliki sejarah panjang dan jelas alur langkahnya.<sup>3</sup>

Kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Dalam hal pribadi penyalahguna itu sendiri narkoba

---

<sup>2</sup> Liputan6.com pabrik ekstasi terbesar di Indonesia digerebek dikunjungi 11/11/05 10-april 2015

<sup>3</sup> Dalam bukunya o.c kaligis narkoba dan peradilan di Indonesia hal 27.

dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan (pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di berbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan kecanduan dan hidupnya akan ketergantungan terhadap kepada zat-zat narkotika, yang bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkotika semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pembahasan mengenai pelaku penyalahguna narkotika yakni sebagai korban. Bila hal ini terjadi maka penyalahgunaan untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, jika kebetulan penyalahguna tersebut mempunyai keuangan yang cukup, mungkin tidak akan memberi efek luar biasa dari pribadi penyalahguna bahkan tidak bisa ketahuan, tetapi apabila pecandu-pecandu narkotika tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus, maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakat karena penyalahguna yang saat ketagihan tidak dapat memenuhi



kebutuhannya dari uang atau barang miliknya sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.

Dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkoba tidak saja terhadap pribadi penyalahguna tetapi juga gangguan terhadap masyarakat yang akan menyebabkan, kecelakaan, kejahatan dan gangguan lainnya terhadap masyarakat. Pada umumnya korban-korban kecanduan narkoba ini adalah kaum remaja (anak muda). Salah satu dampak yang ditakutkan dari narkoba ini adalah rusaknya pergaulan remaja. Pergaulan remaja sangat erat dengan narkoba karena kaum muda ini mempunyai keingintahuan yang tinggi mengenai sesuatu hal termasuk narkoba diawali dengan coba-coba.

Berawal dari perilaku ingin tahu tersebut mereka akan mengalami ketergantungan dengan narkoba. Banyak dari mereka yang segera menyadari bahayanya dan segera berhenti mulai saat itu. Ketergantungan tersebut menyebabkan permasalahan bagi para remaja, kegiatan sekolah menjadi terlantar, dan kondisi kesehatan menurun. Inilah yang menjadi masalah terhadap remaja yang menderita ketergantungan terhadap narkoba mereka dengan mudah mendapatkan narkoba dari orang terdekat. Anak-anak muda atau remaja semacam ini bisa jadi terikat terus pada narkoba untuk kesenangan. Ada juga yang beralasan narkoba sebagai pelarian

atau bentuk protes pada orang tua. Remaja yang kecanduan seperti ini perlu diberikan rehabilitasi agar dapat kembali ke lingkungan dan beraktifitas selayak remaja produktif sebagai generasi penerus bangsa.

Bila dihubungkan dengan bangsa dan negara, Indonesia merupakan tempat yang paling potensial dalam lalu lintas peredaran gelap narkoba, karena generasi mudanya mudah terpengaruh oleh budaya yang datang dari luar apalagi dengan keingintahuan yang tinggi. Permasalahan ini harus disikapi serius oleh pemerintah karena termasuk kedalam nasib bangsa Indonesia yang akan datang dengan generasi telah terlibat dalam kecanduan obat-obat terlarang bisa kita bayangkan bagaimana nasib bangsa di tangan generasi muda yang seperti itu. Pemerintah harus membuat aturan yang lebih mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang serta peraturan yang mengatur seluruh aspek narkoba maupun psikotropika.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai<sup>4</sup>. Pada hakekatnya manusia hidup dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dalam muncul kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lainnya. Kepentingan dari pribadi dan kepentingan golongan-

---

<sup>4</sup> Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.10.

golongan masyarakat selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian atau terjadinya konflik.

Masalah penyalahgunaan narkoba memang telah merusak semua orang yang menggunakannya. Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat. Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap memanusiakan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa. Pada dasarnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum maksimal.

Banyaknya program yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini melalui instansi BNN (Badan Narkotika Nasional) mulai dari pembentukan organisasi sosial di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di setiap daerah dan tingkat pendidikan dari tingkat kanak-kanak hingga tingkat mahasiswa. program yang terbaru adalah program yang menargetkan merehabilitasi pengguna atau korban penyalagunaan narkoba sebanyak 100.000 (seratus ribu) yang hingga Tahun 2015 hanya mencapai 20% dari target.<sup>5</sup> Hal ini membuktikan perlunya khalayak atau masyarakat tahu sejauh mana balai rehabilitasi yang ada di indonesia bekerja.

---

<sup>5</sup> Liputan6.com di lihat tgl 10 juni 2016

Dari banyaknya kasus yang terjadi dan reformasi hukum yang signifikan menyesuaikan keadaan masyarakat hingga pemerintah mengencakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dari intisari ini penulis mengangkat judul **“Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan korban penyalahgunaan Narkoba” (studi kasus Balai rehabilitasi narkoba Baddoka Makassar)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah yang akan di pecahkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah hambatan Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka dalam menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui proses penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah :

1. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian untuk khalayak sebagai informasi tahap-tahap penerapan rehabilitasi terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi narkoba baddoka.
2. Manfaat secara praktis dari penulisan ini adalah di harapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman pembaca maupun penulis mengenai masalah narkotika dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam bidang kita sebagai sarjana hukum nantinya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum memahami tentang narkoba terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu tindak pidana dan bagaimana ketentuan tindak pidana itu. Di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai *straafbaarfeit* tersebut. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *straafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>6</sup> ahli membeberkan beberapa pandangan dari beberapa makna perkataan *straafbaarfeit*.

a. Simons

Dalam rumusan *straafbaarfeit* yaitu:

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2002, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta, Grafindo, hlm 69.

“Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>7</sup>

Simons berpendapat hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh dan yang diancam dengan nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:<sup>8</sup>

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan Undang-Undang di mana pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;

---

<sup>7</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 5

<sup>8</sup> *Ibid*



- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onerchtmatige handeling*.

Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan.

Sehingga sifat melawan hukum itu timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

#### 1. Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut: <sup>9</sup>

- A. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm. 71

perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

B. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

C. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

## 2. J.E. Jonkers

J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah, “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>10</sup>

## 3. H.J. van Schravendijk

H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan

---

<sup>10</sup> Ibid, Hlm 75

dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”<sup>11</sup>

#### 4. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu *Handelen* atau *doen-positif* atau suatu melalaikan nalaten-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>12</sup>

Tindakan semua unsur yang disingung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

##### 1. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid hal 6

tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>13</sup> Menurut Pompe hukum pidana ialah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L. Packer yang menyatakan:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau yang terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancaman yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman,

---

<sup>13</sup> Op.cit

apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>14</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan (Lamintang, 1997:193).<sup>15</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan.<sup>16</sup> tersebut, meliputi:

### **1. Unsur Subjektif**

#### **A. Kesengajaan**

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*).

Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih

---

<sup>14</sup> Effendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Hlm 3

<sup>15</sup> Lamintang, 1997:193.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994., hlm. 103.

berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUUHPP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUUHPP) dan lain sebagainya.

- B. Kelalaian<sup>17</sup> (*Culpa*) Dalam hukum Pidana, dikenal beberapa jenis Kelalaian, yakni : *Culpa lata* adalah kelalaian yang berat. *Culpa levissima* adalah kelalaian ringan, jadi kelalaian ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *Culpa*.
- C. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau piking seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUUHPP.
- D. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- E. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUUHPP.
- F. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUUHPP.

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, hlm.125

## **2. Unsur Objektif**

- A. Sifat melawan hukum
- B. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUUHP
- C. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>18</sup>

## **B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

### **A. Sanksi Pidana Pokok**

#### **1. Pidana Mati**

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.<sup>19</sup>

Kejahatan – kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan – kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas seperti:

- a) kejahatan – kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129);

---

<sup>18</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, op. cit. Hlm .7

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm.29

- b) kejahatan – kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor – faktor pemberat, misalnya: Pasal 140 (3), 340;
- c) kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, 368 ayat 2);
- d) kejahatan – kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444).

## **2. Pidana Penjara**

Dalam Pasal 10 KUUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat ( lembaga permasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu berbeda jauh.

Perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan:

- a) Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran.



Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan.

- b) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan (yakni 1 Tahun).
- c) Pidana penjara lebih berat dari pada pidana kurungan (berdasarkan Pasal 69 KUUHP)
- d) Pelaksanaan Pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. akan tetapi pelaksanaan pidana denda dapat di ganti dengan pelaksanaan kurungan di sebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUUHP).
- e) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh indonesia (dapat dipindah-pindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan di laksanakan di tempat (lembaga pemasyarakatan )dimana dia berdiam ketika putusan hakim di jalankan (tidak dapat di pindahkan)apa bila ia tidak mempunyai tempat kediaman di daerah ia berada, kecuali bila menteri kehakiman, atas permintaan terpidana, meminta menjalani pidana di tempat lain(Pasal 21).
- f) Pekerjaan pekerjaan yang di wajibkan pada narapidana penjara lebih berat dari pada pekerjaan pekerjaan yang di wajibkan pada narapidana kurungan.(Pasal 19).

- g) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan (hak pistole Pasal 23 KUUHP)

### **3. Pidana Kurungan**

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sebagai berikut;

- A. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- B. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. maksimum umum pidana penjara 15 Tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 Tahun, dan pidana kurungan 1 Tahun yang dapat diperpanjang maksimum 4 bulan. minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus di sebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, tergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- C. Orang yang di pidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan

tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara.

D. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu di pisah(Pasal 28 KUUHP)

E. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak di tahan ,yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai hukum tetap ) dijalankan /atau dieksekusi,yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengesekusi dengan cara melakukan tindak paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

#### **4. Pidana Denda**

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III)baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga jenis kejahatan kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa* pidana denda dering di ancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan kejahatan selebihnya jarang sekali di ancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

#### **5. Pidana Tutupan**

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUUHP melalui UU No.20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang di ancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 di nyatakan bahwa pidana tutupan tidak di jatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu,cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

## **B.Sanksi Pidana Tambahan**

Ada tiga jenis pidana tambahan diantaranya;<sup>20</sup>

### **1.Pidana pencabutan hak hak tertentu**

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang di miliki seseorang yang dapat menyebabkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW ). UU hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembagannya) melakukan pencabutan hak tertentu saja yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUUHP , hak-hak yang dapat di cabut tersebut adalah ;

---

<sup>20</sup> Ibid hlm 44.

- A. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu ;
- B. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata /TNI;
- C. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum ;
- D. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- E. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- F. Hak menjalankan mata pencaharian.

## **2. Pidana Perampasan Barang Tertentu**

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya di perkenankan atas barang barang tertentu saja, tidak di perkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan .

- A. Ada dua jenis barang yang dapat di rampas melalui putusan hakim pidana melalui, (Pasal 39), yaitu Barang, barang yang berasal/di peroleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang di sebut dengan *colpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan

pemalsuan uang, surat cek palsu dalam kejahatan pemalsuan surat;

B. Barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumen delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

### **3. Pidana Putusan Hakim**

Pidana putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang ditentukan oleh UU, misalnya yang terdapat dalam KUUHP Pasal:128,206,361,377,395,405.

Maksud dari pengumuman putusan hakim ini, hakim demikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum untuk berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dalam kejahatan (tindak pidana).

### C.Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia, di mana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat dan waktu pada tempat yang lain di mana orang tersebut menggunakan alat alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu di mana telah terjadi sesuatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.<sup>21</sup>

Menurut **Van Bemmelen**<sup>22</sup> yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat di mana seorang pelaku telah melakukan perbuatan secara materil. Yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:

1. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
2. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 8

<sup>22</sup>Evi Hartanti *Ibid.* Hlm. 8

3. Tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
4. Tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

#### **D. Teori Pemidanaan**

Pemidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, teori pencegahan, teori pemulihan pelaku, dan teori pemulihan korban.

##### **1. Teori absolut (Pembalasan)**

Dasar pemikiran dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat dan negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>23</sup>

Teori absolut (pembalasan) membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat Justitia ruat*

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.157



*coelom*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>24</sup>

Dalam teori ini dipandang bahwa pembedaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talions* (dalam kitab lama digambarkan sebagai sebagai *eyes for eyes, life for life, tooth for thoot, hand for hand, foot for foot, burn to burn, wound to wound, dtrife forstrife*).<sup>25</sup>

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

A. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan

---

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, Hlm. 141.

<sup>25</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, Hlm. 51

masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

B. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>26</sup>

Beberapa sarjana seperti Nigel, H.Moris, Murphy dan Von Hirsch, membagi teori ini kedalam dua bagian besar yaitu retributif murni dan positif retributif.<sup>27</sup>

1)       Retributif murni / Retributif negatif

Dalam pandangan retributif murni yang pada dasarnya didasari oleh teori konsekwensialis, pidana murni sebagai pembalasan atau harga yang harus dibayar merupakan tujuan utama. Tanpa menafikkan adanya maksud lain yang ditimbulkan meskipun itu menguntungkan, maka itu adalah sekunder sifatnya.

2)       Retributif Positif

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 142

<sup>27</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, Hlm. 52

Retributif positif melihat bahwa alasan pembalasan saja tidak cukup untuk menjauhkan sanksi pidana. Dibutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana diluar alasan pembalasan semata. Dalam hal ini, efek lain dari sanksi yang dianggap positif, bila dalam pandangan retributif dianggap sekunder sifatnya. Titik berat dari pandangan ini adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari suatu penjatuhan sanksi pidana harus diperhitungkan.

#### 1. Teori *Deterrence* (Pencegahan)

Tidak berbeda dengan teori retributif, deterrence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis. Berbeda dengan pandangan Retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *Deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan (beberapa sarjana melihat pembalasan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan dan karenanya memasukkan Retributif sebagai sub bagian dari (*Deterrence*), yaitu tujuan lain yang lebih bermanfaat.<sup>28</sup>

Teori ini mendasarkan pandangan pada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, pertimbangkan juga

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 54

pencegahan untuk kepentingan dimasa mendatang. Penganjur teori ini antara lain **Paul Anselm van Feurbach** yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.<sup>29</sup> Pengertian dalam teori *deterrence* (pencegahan) ini berbeda sekali dengan teori pembalasan, kalau dalam teori pembalasan itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan. Maka pada teori pencegahan di tunjukkan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Teori *Deterrence* ini sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian. **Utilitarianis Bentham** mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana ialah:<sup>30</sup>

- a. Mecegah semua pelanggaran (*to prevent all ofference*)
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*)
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
- d. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*)

Mulandi dan Berda Nawawi mengutip pandangan Bentham yang menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*Reforming Effect*). Akan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 54

tetapi dia mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan. Alasan memasukkan pandangan Bentham ini adalah pada alasan yang dikemukakannya bahwa hukum pidana jangan digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan.

Dalam pandangan ini tergambarkan jelas bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan. Meskipun secara umum *Deterrence* kerap disebut sebagai teori tujuan pemidanaan baik dalam prespektif pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi ide utama dari teori ini sangat berbeda dengan konsep *Rehabilitatif* dan *Incapacitation*.<sup>31</sup>

## **2. Teori Rehabilitasi (Pemulihan Kembali)**

Rehabilitasi (pemulihan), diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. Konsekuensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktek terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 50

Konsep ini sering dimasukkan kedalam sub kelompok *Deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan **Andrew Ashworth** sesungguhnya rehabilitasi adalah penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *Deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *Deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, *Deterrence* dilatarbelakangi oleh pandangan *rational choice* yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.<sup>33</sup>

### 3. Teori *Restorasi* (Pemulihan Korban)

Bila teori-teori sebelumnya memberikan perhatian kepada pelaku tindak pidana, maka teori ini memberikan perhatian kepada korban. Fokus dari teori ini mulai meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan.<sup>34</sup> Terdapat tiga terminologi yang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm, 56

<sup>34</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 59

sering digunakan dalam pengertian yang hampir sama yaitu, reparasi, restitusi dan kompensasi.<sup>35</sup>

Reparasi dapat diartikan sebagai *The act of making amends for a wrong* (perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar). Reparasi dikatakan sebagai suatu jalan yang harus dilalui oleh pelaku (upaya perbaikan) sebagai konsekwensi atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai *return or restoration of some specific thing to its rightful owner or status* (mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status). Reparasi dan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dan formulasi. Dalam hal ini penghilangan kemerdekaan atau pemberian denda dibenarkan sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan dan diperhitungkan kebermanfaatannya serta kebutuhan yang ingin dicapainya.<sup>36</sup>

Kompensasi sendiri diartikan sebagai "*payment of damages, or another act that a court orders to be done by a person who has caused injury to another process*" (pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya). Dari definisi tersebut bentuk kompensasi tidak melulu

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

berbentuk pembayaran. Kompensasi dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan lain.<sup>37</sup>

## **E. Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Pengertian narkotika mempunyai aturan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang berbunyi<sup>38</sup>

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

### **2. Golongan Narkotika**

Dari pengertian tersebut, tentunya berlaku kepada semua jenis Narkotika, adapun jenis-jenis Narkotika, dibedakan dalam 3 golongan, dimana yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,b, dan huruf c UUN, yaitu :<sup>39</sup>

A.Narkotika Golongan I yakni, Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 1 uu 35 tahun 2009 tentang narkotika

<sup>39</sup> Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat 1 (satu) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.



tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

B.Narkotika golongan II yakni, Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

C.Narkotika Golongan III yakni, Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### 3.Jenis narkotika

Selain dibedakan menjadi golongan, berdasarkan cara pembuatannya, narkotika juga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkotika Alami, Narkotika Semisintetis dan Narkotika Sintetis.<sup>40</sup>

- a. Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya: Ganja, Hasis, Koka, Opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi.

---

<sup>40</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi, hlm 12

- b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: Morfin, Kodein, Heroin, Kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan Narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya.
- c. Narkotika Sintetis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (*Subtitusi*). Contohnya:
1. *Petidin* yang digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
  2. *Methadom* yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.
  3. *Naltrexon* yang juga digunakan dalam penyembuhan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Dalam hal ini, narkotika sintetis berfungsi sebagai pengganti

sementara. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

## **F. Efektifitas hukum**

Efektifitas hukum adalah pencapaian dari aturan yang dibuat apakah aturan tersebut ditaati oleh responden atau target dari aturan tersebut. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'<sup>41</sup>. Apabila sebagian responden atau sebagian target dari aturan tersebut menaati aturan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Seseorang menaati aturan atau tidak suatu aturan tergantung pada kepentingannya, ada beberapa macam kepentingan yang diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*. Ketiga macam kepentingan tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yang telah dikemukakan oleh *H.C. Kelman* dalam buku Menguak Teori Hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*) yang telah dipermudah oleh Achmad Ali sebagai berikut <sup>42</sup>:

- a. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi.

---

<sup>41</sup> Ali,Ahmad,2009,Menguak teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*),PT Prenada Media Group. Hlm 375

<sup>42</sup> op.cit, Hlm 348

Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan bersifat Internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut dan melihat realitasnya, dapat dikatakan seseorang dalam menaati suatu aturan hanya karena salah satu jenis saja misalnya taat karena Complication akan tetapi ada juga seseorang yang menaati aturan dengan hanya dua bahkan ketiga jenis ketaatan tersebut, dikarenakan aturan tersebut cocok dengan nilai-nilai intrinsik, juga ia dapat menghindari sanksi aturan dan menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.

L. Pospisil (1971), menjelaskan lebih lanjut tentang ketaatan yang bersifat *Internalization* <sup>43</sup> :

*“internalization of a rule of behavior does not necessarily mean that such a rule is always maintained in actual behavior. There are situations in which the individual either breaks the rule in the spur of*

---

<sup>43</sup> Ibid. Hlm 349

*the moment, without much thinking, or he consciously compromises a moral conviction for an immediate, and strong enough reward.”*

Selanjutnya setelah melihat pendapat dari H. C. Kelman dan L Pospisil mengenai Jenis-jenis Ketaatan maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut akan tetapi dilihat dari seberapa banyak masyarakat patuh akan peraturan dengan ketaatan yang bersifat ‘*Compliance*’ atau ‘*identification*’ saja berarti walaupun banyak masyarakat patuh tapi kualitas efektifnya masih rendah, akan tetapi banyaknya masyarakat yang patuh atau taat akan peraturan dengan sifat ‘*Internalization*’ maka semakin tinggi kualitas efektifnya aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa seseorang taat apabila ia bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum, sebagaimana dipahaminya. Dengan mengutip pendapat Feest (johannes feest), Friedman menyatakan, bahwa

44.

*“Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles*

---

<sup>44</sup> soerjono Soekanto,1985,Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi,CV Bandung, Hlm 5

*of a continuum. Of the legal behavior in the middle, on important type might be called evasion. Evasive behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability”*

Atas dasar hal-hal yang dinyatakan oleh Friedman di atas, maka kaitannya dengan pengaruh hukum, sikap tindak atau perilaku yang dihasilkan dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*), dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.

Apabila yang dikaji adalah efektifitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain<sup>45</sup> :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar

---

<sup>45</sup> Ali, Ahmad, 2009, Mengungkap teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*), PT Prenada Media Group. Hlm 378

Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada umum nya, Menurut Achmad Ali faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi seseorang menaati suatu peraturan perundang-undangan adalah terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif <sup>46</sup>:

- a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b. Perspektif Individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

Tidak efektifnya pelaksanaan sebuah kebijakan atau aturan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid. Hlm 379

1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan yang masih kurang.
6. buruknya koordinasi antar instansi.
7. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.

Dari beberapa faktor yang ada dapat menarik pandangan bahwa integrasi sebagai penegak aturan perlu di jaga agar efektifitas pelaksanaan penerapan berjalan secara maksimal.

#### **G.Hambatan dalam realisasi penegakan hukum dan peran serta masyarakat dalam menanggapinya.**

Korban penyalahgunaan narkoba merupakan korban dari kejahatan yang terorganisir sehingga sulit untuk aparat penegak hukum untuk menghentikan jaringannya. Banyaknya pengguna yang di rehabilitasi yang selalu terjerat kembali ketika proses

---

<sup>47</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Hlm. 118



rehabilitasi medis karena banyaknya faktor yang mempengaruhi diantaranya lingkungan dan penegakan hukum itu sendiri.

Lawrence m friedman mengungkapkan bahwa semua produk hukum baik dalam bentuk undang undang maupun peraturan perundang undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak. Hal ini bisa di pahami bahwa setiap penegakan hukum harus bersandar pada aturan hukum tertulis sebagai wujud penerapan asas legalitas. Di samping, substansi hukum dapat di jadikan pegangan dan sebagai tolak ukur efektifitas hukum bagi penegak hukum dan peran serta masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.<sup>48</sup>

Kendala kendala yang ada di penegak hukum

1. Kendala eksternal:

- A. Aparat penegak hukum memiliki hak kerahasiaan dan rahasia tersebut di jaga oleh aparat penegak hukum
- B. Hak mendapatkan informasi (pihak masyarakat dan kewajiban memberikan informasi dari aparat penegak hukum sifatnya terbatas.

---

<sup>48</sup> Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, 2004, Raja Grafindo Persada, Hal 141

C. Instansi dan pejabat di bidang penyidikan, penuntutan dan peradilan dapat terbuka kepada publik, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan.

2. Kendala internal:

- A. Kebijakan pemberian informasi (media policy) yang di atur secara ketat dalam prosedur penegakan hukum.
- B. Informasi tentang proses hasil penegakan hukum amat berkaitan dengan pengakuan hak asasi manusia dalam hal sebagai hak tersangka atau terdakwa
- C. Masyarakat mendapatkan informasi tentang suatu peristiwa tindak pidana hanya terbatas ,siapa,kapan,dimana peristiwa itu terjadi sedangkan yang menyangkut masalah mengapa ,dan bagaimana merupakan suatu hal yang harus di rahasiakan.<sup>49</sup>

Beberapa hambatan juga di rasakan oleh pengguna yang di rehabilitasi (Residen) untuk kelaui dari jerumus gelap narkoba diantaranya:

---

<sup>49</sup> Ibid,hal153.

#### A. Faktor Kepribadian

Beberapa hal termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, kesehatan mental dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun dalam permasalahan perilaku seperti kurangnya pengendalian diri, konflik individu atau emosi yang masih belum stabil dan terbiasa hidup senang atau mewah.

#### B.Faktor Keluarga

Kurangnya kontrol orang tua, dalam hal ini orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu menontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, biasanya mereka juga mencari “kesibukan” bersama teman-temannya. Selain itu kurangnya penerapan disiplin dan tanggungjawab dari orang tua sangat berperan penting. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggungjawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak kedalam penyalahgunaan narkoba

#### C.Faktor Narkoba(Narkoba,Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya)

Banyaknya remaja terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba akibat dari mudahnya didapat narkoba di kehidupan dengan harga yang terjangkau, sehingga para remaja mudah mendapatkannya dan cenderung ingin mencoba.

#### D.Faktor Lingkungan

Para remaja tidak hanya hidup di dalam lingkungan keluarga sekolah, melainkan juga dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

#### E.Faktor Sekolah

Lingkungan sekolah yang sering ikut mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya sekolah yang kurang disiplin, tidak tertib, sering tidak ada pelajaran, guru yang kurang pandai mengajar, guru atau pengurus sekolah yang kurang komunikatif. Apabila guru dapat memotivasi secara positif, belajar dan bersosialisasi dengan baik dalam hal kesehatan mental akan memiliki daya tahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

#### F.Faktor Komunikasi Sosial

Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seseorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah

keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas dan susah nya beradaptasi dengan baik.<sup>50</sup>

#### Aturan Tentang Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.<sup>51</sup> Meskipun demikian Undang-Undang ini juga memberi kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun

---

<sup>50</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Hlm. 3.

<sup>51</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia Edisi Revisi 2004*, Jakarta, Djambatan, Hlm. 192

sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).<sup>52</sup> Rehabilitasi sosial dilakukan setelah rehabilitasi medis selesai

Optimalisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkoba ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi jelaskan pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam Pasal

---

<sup>52</sup> *Ibid*

127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai seorang korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bukan hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja namun ada beberapa peraturan lagi yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi, lalu Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) di 33 Provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 01/ PB / MA/III/2014,

Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Mengenai prosedur tetap (protap) dari pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak lagi bisa dianggap main-main. Begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal maka tujuan dibuatnya peraturan tersebut hanya dapat menjadi mimpi.

## Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika

### A. Pecandu Narkotika

#### 1. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur



Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>53</sup>

B. Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Direhabilitasi

Sedangkan, pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi.

---

<sup>53</sup> Laman web [bnn.go.id](http://bnn.go.id), dilihat tanggal 8/6/2016

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

#### Tata Cara Permohonan Rehabilitasi

Dalam konteks pertanyaan Anda soal permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, kami simpulkan bahwa permohonan ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Syarat permohonan telah kami sampaikan di atas. Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa. Jadi, Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa. Dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim

dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.<sup>54</sup>

Jadi, meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.

---

<sup>54</sup> Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, Penelitian tentang “PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”(Studi Kasus Balai Rehabilitasi Bnn Baddoka Makassar)

Dilaksanakan di daerah kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa Makassar merupakan lokasi penelitian representatif karena secara kuantitas jumlah pengguna narkoba di kota Makassar tergolong sangat tinggi dan kasus narkoba terbilang mencengangkan, sehingga menarik niat penulis meneliti hal tersebut. Selain itu agar penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk meneliti dan mengamati sejauh mana efektifitas pelaksanaan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di kota makassar.

Untuk penelitian lapangan penulis memilih lokasi panti rehabilitasi narkoba baddoka di Makassar,BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN(BNNP-Sul-Sel).

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis data yaitu:

1. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau lokasi penelitian. Responden yang dimaksud yakni wawancara dengan pihak pengawas residen “Bro” dan pihak residen yang ada di panti rehabilitasi tersebut
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka ( *library research* ), yaitu membaca serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan ( *field research* ), yaitu pengumpulan data dengan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada para residen dan pengawas panti yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan objek penelitian.

### **D. Analisis Data**

1. Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dianalisis secara kualitatif didukung oleh data kuantitatif, kemudian disajikan dengan deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*. Dalam perkembangannya kasus-kasus Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat di negara ini. Bahkan permasalahan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh pemakai maupun pengedar dalam menjalankan aksinya.

Sebelum kita terlalu jauh berbicara tentang rehabilitasi terlebih dahulu kita perlu tahu apakah Narkotika itu?. Narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 35 TAHUN 2009 Pasal 1 ayat(1).

Permasalah narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk di tanggulasi. Walaupun sudah

banyak upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan narkoba ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya Kota Makassar itu sendiri. Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram ini. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang membutuhkan dan keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengedar dari penjualan narkoba itu sendiri. Dilihat dari keadaannya, narkoba berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang menggunakan narkoba mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak, berawal dari niat coba-coba hingga untuk mendapatkan ketenangan batin dari masalah yang dihadapi. sesuai data yang ada

**Tabel 1**

**Perkembangan kasus yang ditangani di kota makassar.**

NO	KESATUAN	2013	2014	2015
1	RESTABES MKS	184	204	249

Sumber : Polda Sulselbar 2015

BNNP SULSEL

Data diatas narkoba masih merajalela di kota Makassar dan setiap tahun menunjukkan frekuensi peningkatan yang cukup signifikan dan peran lembaga penegak hukum yang tidak tinggal



diam dalam menanggulangi peredaran gelap kasus narkoba yang tidak bisa lagi dianggap mudah memberantasnya.

Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Rehabilitasi narkoba sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi medis sendiri dijelaskan pada Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”

Sedangkan rehabilitasi sosial juga diatur di Undang-Undang yang sama pada Pasal 1 butir 17 yang menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”

Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan bukan hanya untuk efek jera dan pembalasan saja melainkan harus pula bermanfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali kemasyarakat seperti sebelum menggunakan narkotika.

Dalam balai rehabilitasi seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang biasa disebut sebagai residen harus menjalani beberapa tahapan sampai mereka benar-benar sembuh dan kembali kemasyarakat. Adapun tahapan yang harus dijalani adalah sebagai berikut:

1. *Intake Process*

Pada tahapan ini residen akan diperiksa terlebih dahulu, baik pemeriksaan psikis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Selain itu residen juga akan melakukan wawancara awal dan pada akhirnya dikeluarkanlah rujukan untuk residen dalam menjalani proses rehabilitasi. Pada proses ini hanya memerlukan waktu 1 hari.

2. Detoksifikasi

Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan Intake process. Disini residen akan mengikuti proses detoksifikasi untuk membersihkan pengaruh dari zat-zat adiktif dengan beberapa metode seperti *Symptomatic Pharmacotherapy* dan

*Ultra Rapid Opioid Detoxification (UROD)*. Proses detoksifikasi ini dilakukan selama 2 minggu.

3. *Entry (Orientasi/Induction)*

Pada tahapan ini residen akan dijelaskan dan adaptasi mengenai lingkungan dan berbagai aturan-aturan yang ada di tempat rehabilitasi. Tahapan ini dilakukan selama 2 minggu pula.

4. *Primary Stage*

Pada tahapan ini terdapat 3 proses yang harus dijalani oleh residen, yaitu *younger member*, *middle peer*, dan *older member*. Pada proses *younger member*, ada empat poin yang akan didapatkan oleh residen seperti penanaman nilai disiplin dalam diri residen, pengenalan diri sendiri dan sesama anggota kelompok, pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat, dan pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pada diri sendiri. proses ini akan berjalan selama dua bulan. Setelah menjalani proses *younger member* maka residen akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu proses *middle peer*. Pada proses ini residen akan melakukan pemantapan kedisiplinan diri, peningkatan rasa percaya diri dalam anggota kelompok dan kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok, pemantapan pola hidup sehat, pemberian peran dan tugas

dalam ikatan kelompok menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama (*Teamwork Building*), dan pemantapan pengendalian diri. Residen akan menjalani proses ini selama satu bulan. Proses terakhir pada tahapan *Primary Stage* adalah *Older Member*. Pada proses ini residen akan melakukan penguatan kedisiplinan diri menjadi suatu kebutuhan bukan sebagai pemaksaan, pengenalan residen junior, penguatan pola hidup sehat menjadi bagian dari kepribadiannya, penguatan kerjasama dalam kelompok dan kehidupan sosial internal tempat rehabilitasi sebagai tahapan awal kehidupan bermasyarakat, dan pemberian peran dan tugas dalam pelaksanaan operasional tertentu tempat rehabilitasi dan pembinaan kepada residen junior. Residen akan menjalani proses ini selama satu bulan.

##### 5. *Re-Entry Stage*

Tahapan ini juga terbagi menjadi tiga bagian yaitu tahap “A”, tahap “B”, dan tahap “C”. Pada tahap “A” residen akan melakukan tes bakat dan minat, *workshop* atau *outbound* untuk menyiapkan mental dan percaya diri, dan pelatihan penyusunan rencana. Tahap ini akan dilakukan selama satu minggu. Tahap selanjutnya adalah tahap “B”, pada tahapan ini dititikberatkan pada pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun pada tahapan sebelumnya dan akan didampingi oleh konseler atau

pekerja sosial. Evaluasi juga akan dilaksanakan setiap hari setelah kegiatan tersebut terlaksana. Pada tahapan ini residen juga diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga yang dapat dilakukan sewaktu-waktu bahkan residen pun dapat pulang menginap bersama keluarga paling banyak empat kali. Namun selama pulang menginap residen akan diberikan buku saku untuk menuliskan bergabai kegiatannya selama pulang menginap yang diketahui oleh salah satu anggota keluarga. tahap ini akan dijalankan selama satu minggu. Tahapan terakhir adalah tahap “C”, pada tahapan ini dititikberatkan kepada pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh, sosialisasi program pasca rehabilitasi. Pada tahap ini residen juga diperbolehkan untuk mendapat kunjungan dan pulang menginap bersama keluarga.

Jika diakumulasikan maka residen akan menjalani rehabilitasi selama enam bulan. Residen juga diharuskan melaksanakan semua tahapan tersebut, namun tidak semua residen menjalani proses rehabilitasi selama enam bulan. Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Irpan B. Tangahu dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 juli 2016 pukul 10.00 di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, yang menyatakan bahwa:

“Semua residen harus menjalani tahapan rehabilitasi dan itu dijalankan bisa selama kurang dari enam bulan ada juga yang lebih, tergantung hasil *asesment* dan kemauan dari orangnya untuk sembuh.”

Selain program rehabilitasi, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga memiliki program pasca rehabilitasi. Program ini diberikan kepada residen yang telah melakukan rehabilitasi dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pada program ini residen akan dibekali keterampilan dan pengalaman agar nantinya dapat mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari Balai Rehabilitasi BNN Badoka. Ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh residen pada program pasca rehabilitasi ini. Tahap tersebut adalah:

#### 1. Tahap Orientasi Program

Tahap ini merupakan tahap persiapan residen reentry menuju program pasca rehabilitasi. Tahap ini ditujukan untuk memberikan pembekalan dan pengenalan program sesuai jenis program yang ada serta menjadikan residen terbiasa dengan kondisi lingkungan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada:

- a. Penyiapan mental dan percaya diri;
- b. Pemantapan disiplin diri yang sudah dibektuk dalam tempat rehabilitasi; dan
- c. Pengenalan kondisi lingkungan termasuk tata tertib yang berlaku

Tahap ini akan dijalani oleh residen selama dua minggu.

## 2. Tahap Pelatihan dan Praktek

Tahap ini ditujukan untuk memberikan berbagai keterampilan residen dan dilanjutkan dengan praktek sampai memperoleh hasil yang diharapkan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada:

- a. Pemberian keterampilan sesuai bakat dan minat;
- b. Praktek sesuai keterampilan yang diberikan; dan
- c. Integrasi sosial dengan masyarakat sekitar.

Tahap ini akan dijalani oleh residen selama empat minggu.

## 3. Tahap Evaluasi Hasil dan Penyiapan Praktek Kerja Lapangan.

Tahap ini ditujukan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyiapan residen memasuki kehidupan yang sesungguhnya dengan bekal keterampilan yang telah dimiliki selama mengikuti program pasca rehabilitasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir pasca rehabilitasi menuju rumah dampingan.

## 4. Rumah Dampingan

Pada tahap ini residen tinggal di rumah dampingan dengan sesama residen paling banyak berjumlah 10 orang yang didampingi konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis. Pada tahap ini secara berkala residen juga akan mengikuti tes urine. Beberapa kegiatan yang bisa diikuti residen adalah:

- a. Bekerja di Perusahaan;
- b. Usaha Mandiri Produktif; dan
- c. Usaha jasa

#### 5. Rumah Mandiri

Hampir sama dengan rumah dampingan, tahap ini residen juga akan tinggal di rumah mandiri bersama residen yang berjumlah maksimal 10 orang. Namun pada tahap ini residen tidak lagi dimpingi oleh konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis setiap hari melainkan hanya dua kali seminggu saja. Tahap ini tetap akan diadakan tes urine secara berkala. Kegiatan yang diikuti oleh residen juga sama seperti tahap sebelumnya yaitu:

- a. Bekerja di Perusahaan;
- b. Usaha Mandiri Produktif; dan
- c. Usaha jasa.

Berdasarkan jenisnya narkoba telah terbagi dari 3 golongan sesuai tingkat ketergantungan. Jika dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis narkoba yang paling sering digunakan. Adapun jenis narkoba yang paling sering digunakan oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Residen Berdasarkan Zat Yang Dipakai**

No	Usia	Jumlah Residen				2016
		2012	2013	2014	2015*	
1.	Shabu	64	183	31	26	121



2.	Ganja	7	37	16	2	1
3.	Putauw	1	3	0	0	-
4.	Inex	1	7	0	0	-
5.	Destro	3	2	0	0	-
6.	Tramadol	2	21	1	1	3
7.	> 1 Zat	42	83	141	112	7
Jumlah		120	339	189	141	132

*\*Data per tanggal 20 juli 2016*

*Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Baddoka*

Data di atas menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu merupakan salah satu jenis yang paling banyak digunakan. Selain itu jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang menggunakan lebih dari 1 zat juga sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak orang yang tertarik untuk menggunakan narkoba.

Seperti yang kita ketahui bersama, narkoba seharusnya dapat menjadi salah satu obat yang bermanfaat untuk kesehatan jika dikaji dari segi medis. Namun, seiring keberadaannya narkoba saat ini tidak hanya menjadi obat melainkan menjadi salah satu masalah yang tidak ada habisnya. Banyaknya element yang terlibat dalam peredaran narkoba ini menjadikan sulit untuk diberantas, tidak hanya warga asing yang menjadi pengedarnya bahkan tidak jarang juga aparat kepolisian yang melakukan transaksi pengedaran ataupun sebagai pemakai.

Pada perkembangannya, korban penyalahgunaan narkoba semakin tahun semakin meningkat dan tidak lagi memandang umur

orang tersebut. pasien pengguna narkotika dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Residen berdasarkan Kelompok Usia Pengguna Narkotika**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Usia	Jumlah Residen				Total
		2012	2013	2014	2015*	
1.	<16 tahun	4	15	2	1	22
2.	16-20 tahun	26	76	46	39	187
3.	21-25 tahun	32	76	37	29	174
4.	26-30 tahun	32	67	34	31	164
5.	31-35 tahun	18	64	41	25	148
6.	36-40 tahun	4	21	19	9	53
7.	> 40 tahun	4	17	10	7	38
Jumlah		120	339	189	141	789

*\*Data per tanggal 23 April 2015*

*Sumber: Sistem Informasi Narkotika (SIN)*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kelompok usia 16-20 paling banyak menggunakan narkotika. Bahaya dari penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat berdampak pada pribadi si pemakai dan dapat pula berbahaya pada lingkungan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari pemakaiannya pun tidak main-main, ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, peningkatan depresi, berhalusinasi, hingga penyakit kronis dan kematian. Semakin banyak orang yang memilih menggunakan narkotika sebagai jalan singkat untuk setiap masalah yang dihadapi menjadikan keberadaan narkotika semakin subur, karena hal itulah, maka tidak jarang pecandu yang menggunakan narkotika tidak serta merta dapat bebas dari narkotika. Dilihat dari keadaannya banyak faktor yang

mendukung seseorang untuk menggunakan narkoba baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sedangkan data yang ada di lembaga rehabilitasi BNN baddoka Makassar menunjukkan data yang tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi data otentik pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Lihat data di bawah ini di tahun 2015:

**Tabel 4**  
**Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Rehabilitasi Baddoka**  
**Makassar Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2015**

NO	KELOMPOK USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	< 15 Tahun	-	-	-
2	15 – 20 Tahun	73	3	76
3	21 – 25 Tahun	63	10	73
4	26 – 30 Tahun	53	8	61
5	31 – 35 Tahun	54	6	60
6	36 – 40 Tahun	26	3	29
7	> 40 Tahun	16	-	16
8	Tidak Terdata	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		285	30	315

Sumber: Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar, Maret 2016

Pada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar masih menunjukkan data yang sama di tahun 2015. Dimana usia 15-20 Tahun masih terhitung terbanyak dari usia lainnya. Penggunaan narkoba yang berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan pada si pemakai sehingga pecandu tersebut tidak mudah lepas dari penggunaan narkoba, pecandu berdasarkan Pasal 1 butir 13

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan ketergantungan pada suatu narkotika terdapat dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Dalam permasalahan narkotika, peran keluarga sangat diperlukan terhadap perkembangan seorang anak sehingga menjadi acuan terhadap individu-individu yang terjerumus dalam permasalahan narkotika ini. Keluarga seharusnya menjadi hal terpenting dalam pencegahan dan pengawasan dalam menggunakan narkotika. Pengawasan dari orang tua menjadi sangat penting karena dengan pengontrolan yang baik dari orang tua tentunya dapat membatasi gerak dari anak ataupun anggota keluarga lain untuk tidak terjerumus dalam permasalahan narkotika. Namun ada pula orang yang menggunakan narkotika ini berawal

pada permasalahan keluarga, mulai dari perceraian yang terjadi pada orang tuanya sampai kurangnya perhatian yang dia dapatkan sehingga memilih menggunakan narkoba agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.<sup>55</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi pun dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Jumlah residen yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Makassar sesuai tingkatan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>55</sup> Moh. Taufik Makaro, *Opcit*, Hlm. 6

**Tabel 5**  
**Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Rehabilitasi BNN**  
**Baddoka Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015**

NO	KELOMPOK USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	SD	12	-	12
2	SMP	45	7	52
3	SMA	176	20	196
4	Akademi	22	1	23
5	PerguruanTinggi	30	1	31
6	TidakTerdata	-	-	-
JUMLAH		285	29	314

Sumber: Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar, Maret 2016

Hampir setiap hari media menyiarkan beberapa berita tentang kasus peredaran gelap Narkotika itu sendiri hingga narkotika itu tidak memandang status pekerjaan seseorang. Baik itu tingkatan penghasilan rendah ke menengah hingga penghasilan menengah ke penghasilan yang tinggi.hal ini membuktikan bahwa Narkotika tidak memandang apapun pekerjaan seseorang. Dari penelitian yang saya lakukan data yang di berikan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar menunjukkan data sebagai berikut:

**Tabel 6**

**Jumlah Residen Yang Ada Di Balai Rehabilitasi BNN  
Baddoka Makassar Sesuai Status Pekerjaannya.**

NO	KELOMPOK USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Pelajar	38	2	40
2	Mahasiswa	-	-	-
3	TidakBekerja	94	19	113
4	Buruh (Tani, Tukang, dsb)	12	-	12
5	PNS	8	-	8
6	TNI/ POLRI	10	-	10
7	Swasta	21	1	22
8	Wiraswasta	102	8	130
9	TidakTerdada	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		285	30	315

Sumber: Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar, Maret 2016

Data diatas menunjukkan peredaran gelap Narkotika merambah semua jenis pekerjaan.wiraswasta masih bertender di posisi pertama di susul dengan tidak bekerja (pengangguran). Ini membuktikan bahwa cenderung pemaikai atau korban penyalahgunaan Narkotika bermotif coba coba di perjelas oleh salah satu residen yang di wawancarai oleh penulis sendiri mengungkapkan :

“Pada awalnya saya hanya mencoba ketika di tawari oleh teman,rasa penasaran (keingintahuan saya yang tinggi)akhirnya saya terjerumus satu kali mencoba,kemudian esok lagi dan akhirnya ketagihan barang tersebut.”

Penyalahgunaan narkotika seharusnya dapat diberantas. Namun, karena permasalahannya sangat kompleks yang

disebabkan oleh beberapa faktor sehingga upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya komprehensif dan terpadu. Penyebaran informasi yang tepat akan bahaya narkoba dan penyuluhan adalah salah satu upaya pencegahan yang dapat ditempuh untuk memberantas narkoba. Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat seseorang dapat menggunakan narkoba. Terdapat 6 (enam) faktor pendorong orang menggunakan narkoba:

#### **1. Faktor Ketidaktahuan**

Walaupun tindak pidana narkoba merupakan hal yang harus diberantas namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Faktor ketidaktahuan ini merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit orang alami. Pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap narkoba menjadi dasar faktor ini dapat menjadikan seseorang untuk menggunakan narkoba. Dalam hal inilah orang tersebut dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Faktor ini merupakan faktor dimana seseorang sebetulnya tidak menginginkan untuk terjebak dalam permasalahan narkoba, namun dengan ketidaktuannya yang menjerumuskannya kepenggunaan narkoba dan pada akhirnya mengalami ketergantungan.



## **2. Faktor Coba-Coba**

Orang yang mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkotika, bahaya yang ditimbulkan serta aturan hukum yang melarang menyalahgunakan narkotika. Pada kondisi ini, pecandu menggunakan narkotika karena berdasar rasa ingin tahu yang tinggi, meskipun telah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggunaannya. Biasanya orang yang berada pada titik/situasi ini adalah remaja atau anak-anak yang masi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

## **3. Faktor Keluarga**

Tidak jarang, dalam suatu keluarga kerap kali mengalami konflik yang berakibatkan seseorang mengalami frustasi atau orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga. Sehingga anak tersebut mencari jalan agar mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dengan cara menggunakan narkotika. Hal ini dapat terjadi karena seorang anak cenderung memiliki tingkat emosi yang labil sehingga dalam pengambilan keputusan dia tidak mempertimbangkan baik buruknya terlebih dahulu yang pada akhirnya keputusan yang dia lakukan akan berdampak besar untuk kehidupannya. Untuk itu pengawasan dan perhatian dari orang tua sangat berpengaruh untuk perkembangan anak.

#### **4. Faktor Ekonomi**

Pada faktor ini, seseorang yang terjerumus menggunakan narkoba yaitu seseorang yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah sampai tinggi. Terkhusus bagi orang yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah biasanya menggunakan narkoba karena tidak sanggup lagi menahan beban hidupnya yang sulit. Narkoba dijadikan sebagai jalan pintas untuk melupakan semua permasalahan yang membebaninya. Sedangkan bagi orang yang memiliki ekonomi yang tinggi dapat dengan mudah untuk membeli narkoba sesuka hatinya. Dengan begitu banyaknya peredaran narkoba, maka dengan mudah orang tersebut mendapatkan narkoba. Sehingga ekonomi tinggi dan rendah juga memiliki peluang yang tinggi untuk menggunakan narkoba.

#### **5. Faktor Lingkungan**

Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan di mana remaja tidak hanya hidup dilingkungan keluarga ataupun sekolah melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan anak muda masa kini ditambah dengan berkurangnya moral dari generasi muda kita sehingga ada peluang seseorang terjerumus menggunakan narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Terlebih lagi rasa persatuan yang tinggi dalam suatu kelompok menjadikan seseorang diharuskan melakukan apa yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut.

Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

#### **B.Hambatan dalam penerapan rehabilitasi yang dilakukan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.**

Proses Rehabilitasi sebenarnya telah lama di canangkan oleh pemerintah namun sampai saat ini prosedural standar rehabilitasi belum ada aturannya. Dalam prosedural yang dilakukan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar melakukan rehabilitasi medis biasanya hanya sebulan (1) yang di sebut sebagai pemutusan zat (Detoksifikasi) proses selanjutnya di lakukan pengobatan simptomatik merupakan pengobatan yang bertujuan meringankan atau menyembuhkan gejala,bukan mengobati sumber penyakit

Dalam permasalahan yang sering terjadi dalam merealisasikan rehabilitasi terkendala baik dalam bidang hukum maupun anggaran ataupun fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai. Seperti halnya yang di ungkapkan bapak Irpan B. Tangahu pada sela wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 juli 2016 pukul 10.00 WITA di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar , beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya folume Balai ini dapat menampung 250 orang, tetapi anggaran dari pemerintah hanya mampu dipergunakan untuk 150 orang saja. Jadi dalam satu tahun cuma 300 orang yang dapat direhabilitasi disini. Karena semua biaya rehabilitasi ditanggung Negara jadi kalau ada orang ke 301 siapa yang mau

biyai? biaya yang diberikan pemerintah hanya mampu untuk 300 orang saja. Sehingga kalau ada orang yang ke 301 maka dia berada di daftar tunggu dulu sekalian diberi rawat jalan. Tapi kami tidak bisa menjamin apa yang dilakukan diluar sana.”

Melihat pernyataan tersebut,dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang terjerumus dalam peredaran gelap narkoba belum mampu di atasi sepenuhnya dengan mengandalkan fasilitas balai yang terbatas.namun demikian upaya untuk menanggulangi hal tersebut cara saat ini yang bisa di lakukan adalah rawat jalan .

Untuk wilayah Makassar sendiri bukan hanya Balai rehabilitasi yang dapat melakukan rehabilitasi. Ada beberapa rumah sakit maupun puskesmas yang seharusnya dapat, melakukan rehabilitasi namun kembali lagi terhalang oleh sumber daya manusia yang tidak dapat dipekerjakan pada tempat tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Irpan B. Tangahu pada saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 21 Juli 2016 pukul 10.00 WITA di Balai Rehabilitasi BNN Badoka, Makassar , beliau menyatakan bahwa:

“Selain disini ada beberapa tempat yang juga bisa melakukan rehabilitasi seperti di Bayangkara, Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Salewangang, Puskesmas Kasi-Kasi, Puskesmas Ujung Pandang Baru dan Puskesmas Jongngaiya. Tapi itu juga tidak tahu berjalan atau tidak karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Bahkan kalau rumah sakit biasanya akan bilang untuk mengurus pasien biasa saja sudah banyak jadi kalau pecandu biar BNN saja yang urus”

Masyarakat juga dapat membantu dalam hal melaporkan keluarga maupun orang yang mereka ketahui menggunakan Narkotika. sehingga masyarakat dapat juga berperan aktif dalam mengurangi tindak pidana Narkotika ini. Peran serta masyarakat ini diatur pada BAB XIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan orang tua atau wali dari pecandu dapat melaporkan keluarganya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

- “(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Bahkan bagi orang tua atau wali yang mengetahui bahwa keluarganya menggunakan Narkotika tetapi tidak melaporkannya maka orang tua atau wali tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja

tidak melapor , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

Setiap orang dianggap tahu, bila setiap aturan telah dituangkan dalam sebuah Undang-Undang negara dan hukum bersifat memaksa. Namun ada baiknya apabila semua masyarakat benar-benar mengetahui program rehabilitasi ini dan bukan hanya dianggap tahu tentang hal tersebut. Hal ini dapat terjadi dengan cara sosialisasi yang dapat dilakukan oleh instansi terkait. Tentunya peranan pemerintah sangat dibutuhkan baik berupa anggaran, sistem maupun pengawasan. Karena suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan maksimal ketika tidak didukung oleh anggaran yang memadai, sistem yang benar dan juga pengawasan yang tidak maksimal. Hidupkan kesadaran bahwa kesehatan adalah hal yang termahal di dunia ini, bukan orang lain tapi diri kita yang mampu menjaga itu dengan menggunakan niat nasuha.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba oleh Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka Makassar sudah berjalan sesuai dengan peraturan Undang Undang 35 tahun 2009. Namun, tidak menutup kemungkinan kekurangan itu selalu ada dalam menjalankan aturan tersebut.
2. Hambatan Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka Makassar dapat dituangkan dalam tiga poin penting yaitu: Faktor internal Balai, eksternal Balai dan Faktor individual Residen.

#### **B. Saran**

1. Peran dari berbagai pihak pun terutama orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi perkembangan pertumbuhan anggota keluarganya agar tidak terjerumus barang haram tersebut. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi meningkatnya korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Pada dasarnya penerapan sanksi rehabilitasi dalam penyembuhan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sudah sangat

efektif, hal ini perlu dipertahankan untuk kedepannya dalam menyembuhkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah terkait bantuan anggaran maupun untuk sarana dan prasarana dalam proses rehabilitasi untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, Grafindo, 2002.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994.
- Achmad Ali, Mengungkap teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence), PT Prenada Media Group, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Djambatan, 2004.
- Julianan Lisa FR, dkk, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuhamedika, 2013.
- Lamintang, 1997:193.
- O.C kaligis, narkoba dan peradilan di indonesia, cetakan kedua, 2006.
- Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, CV Bandung, 1985.

Siswanto Sunarso, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi.

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

## **INTERNET**

Liputan6.com pabrik ekstasi terbesar di indonesia di gerebek di kunjung 11/11/05 10-april 2015.

Liputan6.com.bnn baru rehabilitasi 20% di lihat tgl 10 juni 2016

## **UNDANG UNDANG**

Undang-Undang 35 tahun 2009.

Mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.

Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010  
tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna  
Kedalam Lembaga Medis dan Sosial.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun  
2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi  
pecandu, penyalahguna , dan korban penyalahgunaan Narkotika  
yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan  
persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan  
pengadilan.

Peraturan bersama Nomor 11 Tahun 2014, Nomor  
PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu  
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam  
Lembaga Rehabilitasi.

Karya ilmiah menyangkut permasalahan yang ada.

Sumber Data

BNNP SULSEL(Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi  
Selatan).

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka makassar.